

Desa Patobong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang 1991-2017

Desi Safitri¹, Muh. Saleh Madjid²

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNM

Email: dhesisafitri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Desa Patobong, perkembangan Desa Patobong, dan dampak terbentuknya Desa Patobong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya Desa Patobong yang tidak terlepas dari Desa Mattombong pada awal Desa Patobong sebagai desa persiapan pada tahun 1991 dan di resmikan pada tahun 1993 secara administrasi dan geografis. Kemudian dalam perkembangannya dilihat setelah terbentuk menjadi sebuah desa dapat dilihat pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, dan bidang sosial budaya mengalami peningkatan. Keberadaan Desa Patobong membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat. Mengingat belum ada yang menulis ataupun meneliti tentang Desa Patobong sebelumnya, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai kajian, selain itu juga peneliti bermaksud menyimpan hasil karyanya di kantor Desa Patobong sebagai salah satu sumber tentang Desa Patobong, karena melihat tidak banyak masyarakat yang tidak mengetahui proses terbentuknya Desa Patobong, perkembangan Desa Patobong dan Dampak dari pembentukan Desa Patobong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik intern dan eksteren), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara dan mengumpulkan sumber profil serta literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

Kata Kunci: *Perkembangan, Desa Patobong, dan Mattiro Sompe*

Abstract

This research aims to determine the background of the formation of Patobong village, the development of Patobong village, and the impact of the formation of Patobong village. The results showed that the background was forming Patobong village which was not detached from Mattombong Village at the beginning of Patobong village as a preparatory village in 1991 and was inaugurated in 1993 administratively and geographically. Later in its development, after being formed into a village can be seen in the field of economics, education, health, social and religious, and the field of social culture has increased. The existence of Patobong village brought a significant impact to society. No one has written or researched about Desa Patobong before, this is the case for researchers interested in raising this title as a study, and researchers intend to save the work in Patobong Village office as a One of the sources about Desa Patobong, because it sees not many people who do not know the process Terpentukya Patobong Village, the development of Patobong village and the impact of the establishment of Patobong village The study uses a historical research method consisting of four phases namely, heuristics (finding and collecting sources), criticism of sources (internal and external criticism), interpretation (source interpretation) and historiography (historical writing). The data collection method is done by means of field research consisting of interviews and collecting profile sources and literature related to the research object.

Keywords: *Developments, Village Patobong, and Mattiro Sompe*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. (Widjaja, 2012) Maka dari itu dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susun pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Dan tiap daerah kabupaten terdapat desa dan kelurahan sebagai satuan pemerintahan yang terendah. (Nurcholis., 2011).

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa dihuni oleh masyarakat oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif sama. Kesaamaan tersebut dilihat dari sistem nilai dan sosial budaya mereka yang hidup bermasyarakat secara rukun. (Maschab, 2013)

Pembentukan desa dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai pembentukan desa, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat. Unsur-unsur pembentukandesa yaitu Jumlah Penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga, Sosial budaya, Memeiliki potensi yang dapat dikembangkan meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia

dan sumber daya ekonomi, Batas wilayah desa atau luas wilayah desa, Sarana dan prasarana pemeritahan(tata kehidupan). (Salman, 2012)

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Pinrang yaitu, Desa Patobong. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa.

Desa Patobong merupakan salah satu desa dari 7 desa dan 2 kelurahan yang ada di kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Desa Patobong terdiri atas 4 dusun diantaranya Dusun Tanete, Dusun Labulang, Dusun patobong dan dusun sibo. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Samaenre dan Desa Siwolong polong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mattombong, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Massulowalie dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Langnga dan Desa Mattiro Tasi yang merupakan wilayah pesisir pantai.

Tujuan dasar melaksanakan pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam merencanakan bagaimna caranya mendekatkan antar kantor pemerintah dengan desa atau wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukan dengan cara pemekaran di tiap-tiap wilayah tertentu, dengan ini daerah tersebut dapat diketahui bagaimana strategi dalam sebuah desa dalam pembagian kecamatan yang dibentuk agar masyarakat bisa mengetahui bagimna daerah tersebut. (Jumiati, 2016)

Desa Patobong merupakan hasil pemekaran dari Desa Mattombong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Desa Mattombong merupakan Desa Induk yang sudah ada sejak tahun 1964. Sebelum pemekaran Desa Mattombong terdiri atas 11 dusun

diantaranya, Dusun Cappakala, Dusun Katteong, Dusun Patobong, Dusun Beru, Dusun Lisse, Dusun Cengkong, Dusun Makoring, Dusun Tosulo, Dusun Sekkang, kampung Coka dan Dusun Barang Palie.

Pemekaran desa dilaksanakan atas usulan tokoh-tokoh masyarakat atau aparat Desa Mattombong pada saat itu mengingat luas wilayah Desa Mattombong terbilang cukup luas kemudian diusulkan untuk dilakukan pemekaran dan di setujui oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Terbentuknya Desa Patobong banyak yang merasakan manfaat dari pemekaran ini dimana akses dalam pemerintahan cukup dekat di jangkau oleh masyarakat, kondisi ini mengakibatkan perubahan pada masyarakat Desa Patobong khususnya dan Kabupaten Pinrang pada umumnya.

Setiap desa memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan yang lain. Desa Patobong sejak resmi dibentuk dari waktu ke waktu bertambah baik karena Desa Patobong hanya 1 lokasi tidak terpecah pada dusun-dusun lain, menjadi satu-kesatuan walaupun terdiri dari beberapa dusun. Selama dibentuk pembanguna Desa Patobong dari waktu ke waktu terus bertambah baik dari segi sarana dan prasarana. Penduduk Desa Patobong bekerja sebagai petani, baik sebagai petani tambak maupun petani sawah.

Mengingat belum ada yang menulis ataupun meneliti tentang Desa Patobong sebelumnya, hali ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai kajian, selain itu juga peneliti bermaksud menyimpan hasil karyanya di kantor Desa Patobong sebagai salah satu sumber tentang Desa Patobong, karena melihat tidak banyak masyarakat yang tidak mengetahui proses terbentuknya Desa Patobong, perkembangan Desa Patobong dan Dampak dari pembentukan Desa Patobong

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, banyak cara yang dilakukan oleh para peneliti baik berdasarkan proses, prosedur,

maupun prinsip yang dianut. Dengan demikian, berdasarkan atas tujuan dan kategori data yang di butuhkan, menyebabkan terjadinya perbedaan metode yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Beberapa metode yang umum digunakan dalam penelitian, salah satunya yaitu penelitian sejarah. (Ahmadin, 2013)

Metode sejarah dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang sistematis dalam merekonstruksi masa lampau. (Sejarah, 2013) Metode sejarah bertujuan memastikan dan mengatakan kembali masa lampau. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analitis serta menginterpretasikan terkait dengan Desa Patobong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah sosial.

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, terdapat cara yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah tersebut. Hal ini sering disebut sebagai metode. Metode berbeda dengan metodologi. Menurut Kenneth D. Bailey, metode adalah teknik penelitian atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. (Madjid, 2008) Penerapan tentang metode penelitian sejarah tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dari metode penelitian sejarah, dimana pada tahap ini seorang peneliti mencari dan mengupayakan penemuan atas sumber sejarah yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Sumber sejarah tersebut dapat berupa catatan, tradisi lisan, dan setiap titik atau secercah apapun yang memberi penerangan bagi cerita kehidupan manusia. (Pranoto., 2010) Wawancara ini dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proses pembentukan Desa Patobong atau masyarakat yang berada di Desa Patobong. wawancara ini dilakukan terhadap Kepala Desa Patobong, Sekretaris Desa Patobong dan tokoh masyarakat Desa Patobong.

b. Kritik

Setelah memperoleh sumber-sumber yang cukup memadai, selanjutnya dilakukan kritik (penyaringan) terhadap sumber tersebut. Kritik terhadap sumber bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta yang seobyektif mungkin, sehingga karya sejarah yang dihasilkan merupakan produk dari proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi maupun manipulasi. (Sjamsuddin, 2007)

c. Interpretasi

Tahapan ini merupakan tahapan dimana kritik sumber telah dilakukan. Pada tahap ini, subjektivitas seorang peneliti akan mulai tampak. Hal ini dapat dipahami karena pada tahap ini imajinasi dibutuhkan untuk menafsirkan seluruh kejadian berdasarkan fakta-fakta sejarah yang telah di peroleh pada tahapan sebelumnya. Terlepas dari hal demikian, peneliti harus bersikap objektif agar karya yang di peroleh nantinya merupakan karya sejarah yang berkualitas. Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasiakan atau di tafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik. Yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kausal. (Madjid, 2018)

d. Historiografi

Tahap ini merupakan tahapan akhir dari penelitian sejarah. Dalam tahap ini peneliti akan menuliskan peristiwa sejarah tersebut dalam sebuah tulisan yang dalam penulisan, pemaparan dan pelaporan menggunakan tata cara tertentu. Dimana dalam hal ini, penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian dengan kajian kepustakaan dan lapangan (wawancara). Penulisan hasil penelitian sejarah seharusnya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan).

C. Tinjauan Penelitian

Salah satu kegiatan dalam karya tulis ilmiah yang patut dilakukan adalah proses kegiatan tinjauan pustaka. Kegiatan tinjauan pustaka dimaksudkan sebagai telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebab ada kesan yang mengangap bahwa apa yang ditulis seakan-akan belum ada orang lain yang lebih dulu menulisnya. Padahal penelusuran pustaka merupakan langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian dan memeperdalam kajian teoritis atau kajian metodologi. Tinjauan pustaka sendiri bertujuan sebagai pendukung, penguat, maupun pembenaran terhadap data yang telah ditemukan.

Pada umumnya penulisan mengenai kajian sosial telah banyak dilakukan, hal ini dilihat dari buku dan tulisan karya ilmiah. Seperti skripsi yang di tulis oleh Bil'akri dengan judul Pembangunan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 1989-2014. (Bil'akri, 2016) Dimana karya tulis tersebut mengkaji tentang tentang perkembangan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru mulai tahun terbentuk 1989 sampai 2014. Selain itu juga ada karya tentang desa yang di tulis oleh Nurwana dengan judul Desa Tamerodo Kecamatan Tamerodo Sendana Kabupaten Majene 1986- 2015. (Nurwana, 2016) Dimana karya ini lebih berfokus pada faktor-faktor baik yang mendukung dan menghambat yang ada di desa Tamerodo Kecamatan Tamerodo Sendana Kabupaten Majene. Skripsi yang di tulis oleh Lola Vitaloka dengan judul Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jenenponto 1991-2015. (Vitaloka, 2016) Karya tulis tersebut pembahasannya difokuskan pada perkembangan Desa Lentu dari segi ekonomi, social budaya dan pertanian. Selain itu juga ada karya tentang desa yang di tulis oleh Indah Afrianti yang menulis tentang Desa Ujung Lamur pada Pemerintahan Hibbu Lattu 1996- 2006. (Afrianti, 2017) Dimana karya ini lebih berfokus pada satu kepala pemerintahan saja yang ada di Desa Ujung Lamuru.

Penulisan tentang desa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian tentang Desa Patobong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang tahun 1991-2017 belum ada yang meneliti, sehingga peneliti tertarik meneliti atau mengkaji Desa Patobong Kecamatan Mattiro Sompe

D. Pembahasan

1. Latar belakang terbentuknya Desa Patobong

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk, struktur social sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. (widjaja, 2003)

Wilayah pedesaan adalah wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kecamatan atau ibukota kabupaten/kota. Mata pencaharian penduduknya umumnya dibidang pertanian dan perikanan. Masyarakat desa memiliki ciri-ciri kebersamaan: saling mengenal, bahu membahu, gotong royong dalam memecahkan masalah dan menghormati nilai kebersamaan.

Dalam pembentukan suatu daerah menurut Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi pertimbangan terbentuknya daerah otonomi dilihat dari factor sebagai berikut:

a. Faktor Kemampuan Ekonomi

Jika dilihat dari factor ekonomi, masyarakat Desa Patobong terlihat cukup matang selain mudahnya akses ke pusat pemerintahan yang mampu mempercepat pembangunan yang ada di patobong (Yundu, 2018). Melihat hal ini penulis menyimpulkan bahwa kehidupan Masyarakat Desa Patobong sudah cukup mapan jika melihat keadannya pada saat dimekarkan.

b. Faktor Potensi Daerah

Sama dengan wilayah lainnya Desa Patobong juga memiliki potensi yang menunjang salah satu set yang tidak bias diabaikan adalah wilayah Desa Patobong

yang menjadi pusat perikanan. Bukan hanya masyarakat dari desa Patobong itu sendiri tetapi juga dari desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Mattiro Sompe.

c. Faktor social Politik

Adanya keinginan masyarakat untuk lebih dekat antara satu dengan yang lain karena mengingat wilayah Desa Patobong yang di anggap terlalu luas maka mampu berdiri sendiri sehingga muda mempercepat pembangunan.

d. Faktor jumlah penduduk

Melihat jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggara otonomi daerah (pasal 5 Undang-Undang Pemuda). (Abdullah, 2002) Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, Desa Patobong sudah memenuhi syarat pembentukan desa.

Desa Patobong adalah sebuah pemukiman yang dulunya adalah sebuah kampung pada era tahun 1950an. Kampung Patobong masih dibawah naungan distrik Langnga. Dimana distrik langnga terdiri atas Kampung Langnga, Kampung Sekkang, Kampung Tosulo, Kampung Beru, Kampung Pallameang, Kampung Patobong, Kampung Cappakala, Kampung Katteong, Kampung Labolong, Kampung Kapa dan Kampung Ammani. Adapun Pemimpin dari setiap Kampung disebut Matoa Kampong. Setelah berlakunya Undang- undang N0 29 tahun 1959, Distrik Langnga dan Distrik Jampue di gabungkan menjadi satu wilayah kecamatan yang dinamakan Kecamatan Mattiro Sompe.

Pada tahun 1962 Distrik Langnga dan Distrik Jampue digabung menjadi satu kecamatan maka lahirlah Kecamatan Mattiro sompe. Pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Mattiro Sompe ada di Langnga. Pada tahun 1964 Kampung-Kampung yang ada di distrik Langnga kemudian di gabungkan dan membentuk beberapa desa diantaranya langnga dan pallameang di gabung menjadi Desa Langnga, patobong dan beru menjadi Desa Mattobong, Labolong, Ammani dan menjadi Desa Mattongang- Tongang, serta

Tosulo dan Sekkang menjadi Desa Massulowalie.

Kecamatan Mattiro Sompe terdiri atas beberapa desa antara lain:

- 1) Desa Langga sebagai ibu kota Kecamatan dengan luas 14, 64 km²
- 2) Desa Mattombong dengan luas 39, 68 km²
- 3) Desa Matotong- tongang dengan luas 26, 39 km²
- 4) Desa lanrisang dengan luas 40,00 km²
- 5) Desa mallongi- longi dengan luas 19, 29 km².

Melihat luasnya wilayah Desa Mattombong sehingga banyaknya dusun yang ingin menjadi desa. maka dilakukan pemekaran besar- besaran yang merupakan suatu usaha politik dan sekaligus dilakukan untuk memperbaiki serta mempercepat pembangunan dan membuat masyarakat lebih muda mengakses pusat pemerintahan . dan hal mendasar lainnya adalah adanya keinginan masyarakat untuk lebih muda dan terarah dalam urusan hukum dan sebagainya.

Maka pada tahun 1991 Desa Patobong menjadi desa Persiapan dan menjadi Desa definitif pada tahun 1993 baik secara administrasi dan geografis. pada awal pemekarannya Desa Patobong melakukan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya secara demokrasi dengan Kepala Desa yang terpilih H Mada Panggewa (Panggewa, 2018).

2. Proses Terbentuknya Desa Patobong

Berdasarkan proses terbentuknya Desa Patobong, perlu di ketahui bahwa pembangunan masyarakat desa atau pembangunan desa merupakan istilah pembangunan masyarakat desa sebagai community development mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (community approach), partisipasi masyarakat (community partisipasion) dan organisasi kemasyarakatan(community organization). Dalam hal ini pendekatan pengorganisasian dan Berdirinya suatu desa didasarkan atas hukum yang mengatur tentang desa tersebut.

Beberapa dasar hokum berdirinya desa sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwnang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan permerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang desa” menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Selanjtnya ,disebut desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul , dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (jamaluddin, 2015)

Desa Patobong resmi terbentuk pada tahun 1993. Secara administrasi dan geografis wilayah kekuasaan Desa Patobong terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Patobong, Dusun Labulang, Dusun, Tanete dan Dusun Sibو. Nama desa Patobong berasal dari bahas bugis. Seperti yang dikemukakan oleh Mandacini Yundu:

“sebelumnya itu nama desa ini sipatuo namun berubah lagi menjadi patobong sebab masyarakat Patobong baik yang

bermukim di Patobong maupun yang merantau jauh lebih mengenal dan lebih familiar dengan nama Desa Patobong daripada Desa Sipatuo sebab nama Patobong telah lama digunakan untuk menamai desa ini bahkan sejak Desa Patobong masih bergabung dengan daerah Mattombong. Nama Patobong ini berasal dari pattombong (penambah), orang patobong selalu mau besar, akar katanya ini mattombong yang selalu mau menambah. Kalau secara kultur patobong ini selalu mau berkembang.. (Yundu, 2018)

Adapun tujuan pemerintah melakukan pemekaran atau pembentukan suatu wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Percepatan pertumbuhan kehidupan demikrasi
- 3) Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
- 4) Percepatan pengelolaan potensi daerah
- 5) Peningkatan keamanan dan ketertiban
- 6) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. (Indonesia, 2019)

Dalam proses pembentukan Desa Patobong terdapat adanya politik, dimana masyarakat sebelumnya ingin memisahkan desa Patobong dari induknya (Mattombong), hal ini menunjang adanya pemekaran karena suatu tuntutan bahwa jumlah penduduk dan wilayah geografis sudah memenuhi syarat.

Dalam proses pembentukan Desa Patobong terdapat adanya politik, dimana masyarakat sebelumnya ingin memisahkan desa Patobong dari induknya (Mattombong), hal ini menunjang adanya pemekaran karena suatu tuntutan bahwa jumlah penduduk dan wilayah geografis sudah memenuhi syarat.

Adapun orang-orang yang berpengaruh dalam pemekaran Desa Patobong ini yaitu aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memekarkan desa induknya (Mattombong) karena wilayah Desa Mattombong terbilang cukup luas

kemudian diusulkan untuk dilakukan pemekaran besar-besaran di Desa Mattombong dan salah satunya di Desa Patobong karena wilayah dan jumlah penduduknya masuk dalam kategori pembentukandesa

Orang-orang yang berpengaruh dalam pembentukan Desa Patobong yaitu:

- 1) A. Bitara A. Salle Mattoala sebagai Kepala Desa dimana Desa Patobong masih menjadi desa persiapan.
- 2) A. Sappe Wali sebagai Kepala Dusun Desa Patobong
- 3) Muchtar Jalle sebagai kepala Desa Mattombong
- 4) H Mada Panggewa sebagai Kepala Desa pertama setelah Desa Patobong resmi menjadi desa defenitif. (A.Salle, 2018)

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah memerintah Desa Patobong dari tahun 1991-2017 yaitu:

- 1) Periode 1991- 1993 dimana pada saat itu Desa Patobong masih menjadi desa persiapan yang menjabat Kepala Desa Patobong yaitu : A. Bitara A.Selle Mattola
- 2) Periode 1993-2001 melalui pesta demokrasi yaitu pemilihan langsung dari masyarakat yang pertama kalinya dilakukan di Desa Patobong hasil pemilihan dengan masa jabatan 8 tahun yaitu :H.Mada Panggewa
- 3) Periode 2001-2006 kepala Desa yang kedua menjabat di Desa Patobong hasil pemilihan untuk masa jabatan 5 tahun yaitu : Ir. H. Gunawan
- 4) Periode 2006-2013 Kepala Desa Patobong terpilih untuk kedua kalinya dengan masa jabatan 7 tahun yaitu : Ir. H. Gunawan
- 5) Periode 2013- 2018 Kepala Desa Patobong dengan masa jabatan 5 tahun yaitu :H.Muslimin Malli. (Patobong, 2018)

Ekonomi adalah suatu faktor utama sebagai tolak ukur kemakmuran suatu bangsa. Aktivitas ekonomi muncul dan berkembang di sebabakan masyarakat senantiasa untuk mempertahankan

kelangsungan hidup, sehingga setiap manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ekonomi salah satu segi kehidupan yang erat hubungannya dengan sendi kehidupan lainnya. Proses pembangunan selama ini telah berhasil menciptakan kemajuan diukur dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu semakin maju. Dalam era modernisasi, teknologi telah mengganti banyak peran tenaga manusia .karena itu hubungan fungsional dengan manusia lainnya sangat penting adanya. (SupriadiTorro, 2013)

Masalah ekonomi merupakan suatu aspek yang sangat menentukan akan kemajuan suatu wilayah. Jika perekonomian suatu wilayah dapat terjaga maka masyarakat yang ada di dalamnya di wilayah tersebut ikut tentram juga, sebaliknya jika perekonomian di suatu wilayah tidak stabil maka keadaan masyarakat juga akan merasa tidak aman. (Nurwana., 2016)

Struktur perekonomian di daerah pedesaan masih lebih kepada sektor pertanian (kontribusi sektor pertanian masih sangat besar) . walaupun demikian masalah ekonomi juga tergantung oleh tipologi suatu daerah. Tipologi menggambarkan tipe atau pola sebagai pencerminan model berdasarkan kemiripan atau keserupaan ciri-ciri, potensi dan sumber daya (alam, manusia dan buatan) yang dimiliki oleh suatu desa dapat dilakukan berdasarkan aspek topografi, maka tipologi desa sekurang kurangnya menjadi empat, yaitu (1) desa daerah pegunungan (2) desa dataran tinggi (3) desa dataran rendah (4) desa (pesisir) pantai. (Adisasmita, 2006) kondisi ekonomi suatu daerah atau wilayah tergantung dari sumber daya alam yang dimiliki dan kemampuan daerah tersebut untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

Perkembangan ekonomi masyarakat Desa Patobong senantiasa berawal dari adanya target pemenuhan kebutuhan

hidup. Wilayah Desa Patobong memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, lokasi yang relative dekat dengan ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal sehingga mata pencaharian masyarakat Desa Patobong beranekaragam .

Aktivitas perekonomian yang ditekuni masyarakat di Desa Patobong sangat rentang terhadap terjadinya instabilitas harga. Pada waktu dan musim tertentu produk terutama produk pertanian/perikanan) dapat mencapai hargayang begitu tinggi. Akan tetapi pada musim yang lain, harga produk pertanian/peternakan dapat menurun keharga yang sangat rendah.

Masyarakat DesaPatobong tidak hanya bergelut di bidangpertanian, namun di bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat DesaPatobong, dimana Pegawai negeri sipil laki- laki hanya berjumlah 10 orang dan perempuan hanya berjumlah 37 orang, pedaganSg laki- laki berjumlah 9 orang dan perempuan 27 orang, peternak laki-laki berjumlah 13 orang dan perempuan berjumlah 9 orang, montir berjumlah 6 orang, nelayan berjumlah 48 orang, pengrajin berjumlah 4 orang, dokterberjumlah 2 orang, honorer laki- laki berjumlah19 orang dan perempuan berjumlah 20 orang, dan supir berjumlah 2 orang, penjahit berjumlah 7 dan tenaga kesehatan laki- laki berjumlah 5 dan tenaga kesehatan perempuan berjumlah 7.

Pola mata pencaharian yang paling banyak di tekuni oleh Masyarakat Desa Patobong adalah bertani dari jumlah penduduk , sisanya bekerja sebagai pegawai, pedagang dan lai-lain.

Pertanian adalah satu sektor yang mendapat perhatian dari masyarakat. bahkan petani merupakan mata pencaharian pokok bagi sebagian besar penduduk pedesaan. Oleh karena itu wajar

jika Inonesia mendapatkan julukan sebagai negara agraris. Desa sebagai penyuplai sumber kebutuhan masyarakat kota berperan penting dalam menjaga ketersediaan sumber makanan pokok bagi seluruh masyarakat. Pada pundak para petanilah beban itu dipikul . (Dindin Nasrudin, 2007)

Teknologi baru di sector pertanian yang telah diperkenalkan sejak tahun 1970-an memang secara ekonomis telah dapat mengefisienkan kegiatan usaha tani, meningkatkan produktivitas menghemat ongko sproduksi, meningkatkan frekuensi waktu tanam dan mengurangi waktu kerja. Akan tetapi, hal ini sekaligus juga telah menggantikan tenaga kerja manusia. Dalam hal ini penggunaan teknologi di sector pertanian sama halnya dengan penyempitan lapangan pekerjaan yang tersedia di sector pertanian di Desa Patobong karena adanya teknologi yang mulai muncul pada awal tahun 2000-an . sektor ekonomi di bidang pertanian mengalami perkembangan karena bisa di lihat dari hasil panen yg di dapatkan dari petani semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan bahwa banyaknya jenis-jenis pertanian, perekebunan dan luas lahan Desa Patobong .

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang bagi kehidupan dan masa depan seseorang dalam memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik. Tujuan pendidikan pada suatu kelompok masyarakat merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia serta memberikan wawasan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari kebodohan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang bagi kehidupan masa depan seseorang dalam memperoleh kehidupan yang baik.

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mendukung perkembangan suatu daerah. Hal ini berkaitan langsung dengan ketersediaan sumber daya manusia(SDM) yang cukup berkualitas. Merujuk pada Undang- Undang pasal 31 ayat 2 maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara

konsisten berupaya meningkatkan sumber daya manusia Penduduk Indonesia melalui pendidikan.

Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya sulit dipisahkan, sebab hanya dengan pendidikan maka mutu SDM dapat ditingkatkan. Pendidikan memainkan peran utama dan penting bagi pengembangan wawasan pengetahuan dan keahlian para penduduk.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui bidang pendidikan yang berguna meningkatkan sumber daya manusia diman guru mempunyai peranan penting . untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diterapkan program wajib belajar enam tahun dan sembilan tahun serta memberikan subsidi pada jenjang perguruan tinggi bagi yang berprestasi dan kurang mampu.

Pendidikan sebagai sarana penunjang pembangunan sangat penting artinya untuk membentuk manusia berkualitas, mempunyai wawasan pandang dan berfikir yang luas dan berkepribadian. Keadaan tingkat pendidikan masyarakat Desa Patobong cukup beragam. Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Patobong dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. oleh karena itu pendidikan sangat penting bagi kemajuan kehidupan suatu bangsa .

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi harus didukung oleh fasilitas atau sarana dan prasarana antara lain Sekolah Taman Kanak- kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga Perguruan Tinggi.

E. Kesimpulan

Dampak Desa Patobong dalam bidang politik dan bidang ekonomi dimana dalam bidang politik terjadinya pemekaran besar besaran dan setiap dusun menginginkan agar menjadi desa dengan upaya yang dilakukan oleh tokoh- tokoh masyarakat. dampak dari bidang ekonomi yaitu

terjadinya perkembangan dalam bidang pertanian dan perikanan dan dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Daftar pustaka

- Abdullah, R., 2002. , *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*. Jakarta: Rajawali pers.
- A.Salle, A. B., 2018. *Wawancara Mengenai Pembentukan Desa Patobong* [Interview] (November 2018).
- Adisasmitha, R., 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Frianti, I., 2017. “ Desa Ujung Lamuru Pada Pemerintahan Hibbu Lattu (1996-2006). In: Makassar: FIS UNM.
- Ahmadin, 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Makassar: Rayhaman Intermedia.
- Bil’akri, 2016. Pembangunan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (1989-2014). In: Makassar: FIS UNM.
- Dindin Nasrudin, 2007. *Melirik potensi Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Jakarta: CV. Karya Mandiri Pratama.
- Indonesia, P. P. R., 2019. *Peraturan Pemerintah RI*. [Online] Available at: [www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com) [Accessed Jumat Desember 2019].
- Jamaluddin, A. N., 2015. *Sosiologi pedesaan*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Jamaluddin, A. N., 2015. *Sosiologi pedesaan*. Bandung: Pustaka Stia.
- Jumiati, N., 2016. Kecamatan Dompu tahun 1999-2015. In: Makassar: FIS UNM, pp. 2-3.
- Madjid, A. R. H. d. M. S., 2008. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Madjid, M. S., 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Maschab, M., 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Nurcholis., H., 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurwana., 2016. Desa Tammerodo Kabupaten Ponre 1986-2015. In: *Skripsi*. Makassar: FIS UNM, p. 21.
- Nurwana, 2016. Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo sendana Kabupaten Majene(1986-2015). In: Makassar: FIS UNM.
- Pangewa, H. M., 2018. *Wawancara di Desa Patobong* [Interview] (November 2018).
- Patobong, A. D., 2018. Nama-Nama Kepala Desa Patobong. In: Pinrang: Desa Patobong.
- Pranoto., S. W., 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yoyakarta: Graha ilmu.
- Salman, D., 2012. *Sosiologi iDesa Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*. Makassar: nawa.
- Sejarah, T. p. J. P., 2013. , *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: UNM.
- Sjamsuddin, H., 2007. . *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.SupriadiTorro, D., 2013. *Kelompok Strategis Dalam Masyarakat*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Vitaloka, L., 2016. Desa Lentu Kecamatan Bontoramba KabupatenJeneponto (1991-2015). In: Makassar: FIS UNM.
- Widjaja, H., 2003. . *OtonomiDesa*. Jakarta: PT raja Grafida Persada.
- Widjaja, H., 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat DanUtuh*. Jakarta: Rajawali.
- Yundu, M., 2018. [Interview] (November 2018).
- Yundu, M., 2018. *Wawancara di Patobong* [Interview] (November 2018).